



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA**  
**BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN**  
**BULAN NOVEMBER 2018**

**Pendahuluan**

Komnas HAM merupakan lembaga pelayanan publik yang menjadi tempat permintaan perlindungan yang terakhir bagi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga diambil alih oleh Negara / Koorporasi / Kelompok Bersenjata. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memenuhi permintaan warga tersebut ada dalam fungsi penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

**A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan**

Pada 1 sampai dengan 30 November 2018, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **493 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

**1. Kategori Berkas**

Kategori Berkas Kasus										Total
Berkas Kasus Baru 1x					Berkas Lanjutan					
PMT	MDS	Tim	File	Perwakilan	PMT	MDS	Tim	File	Perwakilan	
29	5	0	125	12	128	69	0	70	55	493

## 2. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	7	20	Kalimantan Barat	9
2	Sumatera Utara	41	21	Kalimantan Selatan	8
3	Bengkulu	1	22	Kalimantan Tengah	6
4	Jambi	4	23	Kalimantan Timur	8
5	Riau	20	24	Kalimantan Utara	2
6	Sumatera Barat	26	25	Gorontalo	3
7	Sumatera Selatan	11	26	Sulawesi Selatan	14
8	Lampung	3	27	Sulawesi Tenggara	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	28	Sulawesi Tengah	6
10	Kepulauan Riau	2	29	Sulawesi Utara	7
11	Banten	14	30	Sulawesi Barat	0
12	Jawa Barat	34	31	Sulawesi Selatan Barat	0
13	DKI Jakarta	120	32	Maluku	28
14	Jawa Tengah	30	33	Maluku Utara	0
15	Jawa Timur	43	34	Papua	3
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	13	35	Papua Barat	0
17	Bali	0	36	Jerman	1
18	Nusa Tenggara Barat	7	37	Tanpa Alamat	15
19	Nusa Tenggara Timur	4	37	Perancis	2
Jumlah					493

## 3. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Pemantauan dan penyelidikan	213
2	Mediasi	84
3	Tim	0
4	File	196
Jumlah		493

#### 4. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	241
2	Tembusan	245
3	Tanpa Penjelasan	7
Jumlah		493

#### 5. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	72
2	Pos	380
3	Fax	2
4	Email	23
5	Online	7
6	Audiensi	1
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	6
8	Tidak Ditujukan kepada KH RI	2
Jumlah		493

#### 6. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	12
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	8
4	Hak memperoleh keadilan	114
5	Hak atas kebebasan pribadi	13
6	Hak atas rasa aman	20
7	Hak atas kesejahteraan	219
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	5
9	Hak perempuan	1
10	Hak anak	2
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	3
12	Non HAM	96
Jumlah		493

## 6.1. Klasifikasi pengaduan

<b>I. Hak Untuk Hidup</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mempertahankan hidup	1
Lingkungan hidup	11
	12
<b>II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
	0
<b>III. Hak mengembangkan diri</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak atas pendidikan	8
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	0
	8
<b>IV. Hak memperoleh keadilan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	91
Kesewenang-wenangan proses hukum di Kejaksaan	5
Kesewenang-wenangan proses hukum di pengadilan	15
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	2
	113
<b>V. Hak atas kebebasan pribadi</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Keutuhan pribadi	0
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	7
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	0
Berkumpul, berapat, dan berserikat	4
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	1
Menyampaikan pendapat di muka umum	1
Status kewarganegaraan	0
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	0
	13
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mencari suaka	1
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	2
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	3

Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	2
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	8
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	2
	18
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	5
Hak atas kepemilikan tanah	94
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	32
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	26
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	50
Hak atas kesehatan	7
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	4
	218
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	1
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	0
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	3
	4
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	0
Hak atas kesetaraan dengan suami	1
	1
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	1
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	1
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	1

Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
	3
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	2
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	0
	2
<b>XII. Non HAM</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Non Ham	101
Jumlah Seluruh	493

## 7. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	POLRI	1
2	Korporasi	3
3	Lembaga pelayanan kesehatan	1
4	Lembaga pendidikan	3
5	Individu - Orang seorang	185
6	Individu - Anak	8
7	Individu - Perempuan	11
8	Individu - Buruh migran	5
9	Individu - Pekerja/Profesi	26
10	Individu - Ras dan etnis	4
11	Individu - Penyandang cacat	4
12	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	4
13	Individu - Narapidana	3
14	Kelompok - Masyarakat	117
15	Kelompok - Anak anak	8
16	Kelompok - Perempuan	1
17	Kelompok - Buruh Migran	1
18	Kelompok - Pekerja	24
19	Kelompok - Masyarakat Adat	6
20	Kelompok - Ras dan Etnis	2
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	5
22	Kelompok - Penyandang Disabilitas	1
23	Kelompok - LGBT	1
24	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
25	Organisasi	1
26	Warga Negara Asing (WNA)	2
27	Tanpa Keterangan Pihak Korban	64

## 8. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah Berkas
1	Pemerintah pusat (kementerian)	58
2	Pemerintah daerah	61
3	Lembaga negara (non kementerian)	12
4	Lembaga peradilan	21
5	POLRI	107
6	TNI	14
7	Kejaksaan	6
8	Lembaga Masyarakat dan/atau Rumah Tahanan Negara	2
9	Pemerintah negara lain	2
10	Korporasi	86
11	BUMN/BUMD	22
12	Lembaga pendidikan	12
13	Individu - Orang seorang	6
14	Individu - Perempuan	2
15	Individu - Pekerja/Profesi	5
16	Kelompok - Masyarakat	4
17	Kelompok - Masyarakat Adat	4
18	Organisasi	4
19	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	65

## 9. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (c) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan saat ini sebagai salah satu kegiatan reguler dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

<sup>2</sup> Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
9	22	96	<b>127</b>

Jakarta, 4 Desember 2018

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**  
**a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM**  
**KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN**

**Rima Purnama Salim**